



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH JOGJA *SMART PROVINCE* TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan alternatif penyelesaian permasalahan dan inovasi yang menyesuaikan dengan kekhasan karakteristik dan kearifan lokal;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang sistematis dan terencana sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, perlu pendekatan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui *Jogja Smart Province*;
 - c. bahwa untuk mewujudkan *Jogja Smart Province* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu instrumen akselerasi yang efektif dan efisien berupa rencana aksi daerah;
 - d. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta belum mempunyai pengaturan mengenai rencana aksi daerah *Jogja Smart Province*;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah *Jogja Smart Province* Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH JOGJA *SMART PROVINCE* TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 adalah pendekatan kreatif dan inovatif Pemerintah Daerah dan kelompok pemangku kepentingan dalam penyelesaian isu strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan provinsi melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah untuk tercapainya kehidupan masyarakat Yogyakarta yang sejahtera, sehat, nyaman, dan aman.
2. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) adalah upaya mewujudkan ekosistem sosial, ekonomi, dan teknis yang bersifat humanis demi terwujudnya masyarakat yang produktif dengan literasi digital dan adaptabilitas yang tinggi.
3. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan komponen utama pendukung aktivitas masyarakat.
4. Kebudayaan Cerdas (*Smart Culture*) adalah penumbuhan dan pengembangan kebudayaan melalui penguatan ekosistem budaya berbasis masyarakat.

5. Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*) adalah upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
6. Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) adalah upaya mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan yang efektif, efisien, dan komunikatif melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta karena dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di masa yang akan datang.
8. Arah Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengarahkan rasionalitas pilihan rumusan strategi agar lebih terarah dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 (lima) tahun.
9. Strategi adalah rangkaian tahapan atau langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Solusi Indikatif adalah suatu rancangan awal program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Aspek Perubahan adalah sumber daya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa struktur, suprastruktur, dan infrastruktur Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Sumber Dana adalah sumber pendanaan rencana solusi indikatif yang digunakan oleh perangkat daerah

untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi Solusi Indikatif dan mengukur berbagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
14. Pemangku Kepentingan adalah para pihak, lintas pelaku, atau pihak yang terkait dengan permasalahan dan Isu Strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan terlibat dalam pelaksanaan Solusi Indikatif.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 berlandaskan kepada nilai:

- a. Sangkan paraning dumadi yakni pendekatan terhadap nilai-nilai luhur ketuhanan berupa jujur, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, ramah, disiplin, dan komitmen dalam menjalani kehidupan;
- b. Hamemayu hayuning bawana yakni ajakan untuk hidup dalam keindahan, keselarasan, dan keharmonisan pada lingkup berbangsa dan bernegara; dan
- c. Manunggaling kawula lan gusti yakni bersatunya pemimpin dengan rakyat dalam sebuah hubungan yang simetris dan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara keduanya.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 bertujuan sebagai berikut:

- a. sebagai panduan pelaksanaan dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- b. memberikan pilihan solusi yang berbasis inovasi dan didukung oleh pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien;
- c. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan program dan kegiatan;
- d. sebagai panduan pengelolaan struktur, suprastruktur, dan infrastruktur; dan
- e. mewujudkan ruang partisipasi publik dalam pembangunan.

Pasal 4

- (1) Pilar Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 terdiri dari:
 - a. struktur;
 - b. suprastruktur; dan
 - c. infrastruktur.
- (2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pembiayaan.
- (3) Suprastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. kebijakan; dan
 - c. proses kerja.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II
RUANG LINGKUP RENCANA AKSI DAERAH
JOGJA *SMART PROVINCE* TAHUN 2019-2023

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 meliputi:
 - a. Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
 - b. Kebudayaan Cerdas (*Smart Culture*);
 - c. Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*);
 - d. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*); dan
 - e. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*).
- (2) Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bidang kerja pada sektor tata kelola pemerintahan.
- (3) Kebudayaan Cerdas (*Smart Culture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bidang kerja pada sektor budaya.
- (4) Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki bidang kerja pada sektor kewilayahan dan lingkungan.
- (5) Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki bidang kerja pada sektor mobilitas dan pariwisata.
- (6) Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki bidang kerja pada sektor pendidikan, kemasyarakatan, dan ekonomi.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat Isu Strategis, Arah Kebijakan, rumusan Strategi, Solusi Indikatif, Aspek Perubahan, Sumber Dana, Indikator, Pemangku Kepentingan, dan capaian target pertahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III IMPLEMENTASI

Pasal 7

Implementasi Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 dirancang berdasarkan:

- a. siklus besar; dan
- b. siklus kecil.

Pasal 8

Siklus besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan evaluasi dan penilaian terhadap isu, fenomena sosial, dan dinamika di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan setelah periode Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 berakhir dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Jogja *Smart Province* pada periode berikutnya.

Pasal 9

- (1) Siklus kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. perumusan rekomendasi Strategi;
 - b. perumusan rekomendasi Solusi Indikatif;
 - c. rekomendasi rencana aksi;
 - d. implementasi rekomendasi rencana aksi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Perumusan rekomendasi Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pendekatan multi sektoral dan multi pemangku kepentingan terhadap pemeriksaan dan verifikasi terhadap isu utama.
- (3) Perumusan rekomendasi Solusi Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengkajian berdasarkan isu strategis permasalahan.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menelaah kinerja dan capaian dari implementasi rencana aksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi pada periode berikutnya.
- (6) Siklus kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama periode Rencana Aksi Daerah *Jogja Smart Province* Tahun 2019-2023.
- (7) Dalam siklus kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (8) Rekomendasi pada siklus kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah *Jogja Smart Province* Tahun 2019-2023 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 46 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH JOGJA *SMART PROVINCE* TAHUN 2019-2023

ROAD MAP JOGJA *SMART PROVINCE* TAHUN 2019-2023

A. Pemerintah Cerdas (*Smart Governance*)

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
	Kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Percepatan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK secara efektif, efisien, dan berkesinambungan	Penyusunan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik										
1				Penyusunan kebijakan pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik instansi pemerintah	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik instansi pemerintah dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1					
2				Penyusunan kebijakan inovasi proses kerja terintegrasi	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan inovasi proses kerja terintegrasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY;		1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							terintegrasi dan terukur/optimum.	Biro Organisasi Setda DIY.					
3				Penyusunan kebijakan rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1				
4				Penyusunan kebijakan anggaran dan belanja TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan anggaran dan belanja TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1				
5				Penyusunan kebijakan data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1				
6				Penyusunan kebijakan pusat data terpadu	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan pusat data terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum.	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1				
7				Penyusunan kebijakan infrastruktur jaringan TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1				
8				Penyusunan kebijakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
9				Penyusunan kebijakan integrasi aplikasi	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan integrasi aplikasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.		1				
10				Penyusunan kebijakan aplikasi umum berbagi pakai	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan aplikasi umum berbagi pakai dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi DIY.			1			
11				Penyusunan kebijakan keamanan data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan keamanan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.		1				
12				Penyusunan kebijakan keterbukaan data	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan keterbukaan data dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1	1	1	1	1	
13				Penyusunan kebijakan satu data terpadu	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan satu data terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1					
14				Penyusunan kebijakan keamanan informasi (privasi, integritas, otentifikasi, ketersediaan, riwayat kejadian, hak akses)	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan keamanan informasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.		1				
15				Penyusunan kebijakan manajemen dokumen	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan keamanan jaringan dengan tingkat kematangan kapabilitas proses	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY;			1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				elektronik (electronic record management)prosedur, pengamanan jaringan, akses, dokumen, dan ruangan)			yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.					
16				Penyusunan kebijakan standar mutu, layanan, dan aplikasi	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan standar mutu, layanan, dan aplikasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1				
17				Penyusunan kebijakan manajemen perubahan.	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan manajemen perubahan dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.		1			
18				Penyusunan kebijakan pengelolaan situs resmi pemerintah DIY (domain, sub domain)	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik instansi pemerintah dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1				
19				Penyusunan kebijakan pemanfaatan media sosial kedinasan (perangkat daerah, personal dinas) (perangkat daerah, personal dinas)	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan pengelolaan situs resmi pemerintah DIY dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1				
20				Penyusunan kebijakan pemanfaatan instant messaging (WhatsApp, Telegram, Line) kedinasan	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan pemanfaatan instant messaging dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				(perangkat daerah, personal dinas)				DIY.					
21				Penyusunan kebijakan legalitas penggunaan sistem informasi, aplikasi perkantoran, sistem informasi, sistem manajemen basis data	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan legalitas penggunaan sistem informasi, aplikasi perkantoran, sistem informasi, sistem manajemen basisdata dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY.			1		
22				Penyusunan kebijakan pengelolaan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik:									
23				Penyusunan kebijakan layanan naskah dinas berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan naskah dinas berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Organisasi Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY.					1
24				Penyusunan kebijakan layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Badan Kepegawaian Daerah DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY.	1				
25				Penyusunan kebijakan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Bappeda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; BPKA DIY.	1				
26				Penyusunan kebijakan layanan manajemen keuangan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan manajemen keuangan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi terintegrasi	BPKA DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY.	1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							dan terukur/optimum.						
27				Penyusunan kebijakan layanan manajemen aset/barang daerah berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan manajemen aset/barang daerah berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	BPKA DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY.	1				
28				Penyusunan kebijakan layanan manajemen kinerja berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan manajemen kinerja berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum.	Biro Organisasi Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Inspektorat DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY.			1		
29				Penyusunan kebijakan layanan pengadaan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pengadaan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro PIWPP Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Biro Hukum Setda DIY.	1				
30				Penyusunan kebijakan layanan surat elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan surat elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.		1			
31				Penyusunan kebijakan sistem pendukung keputusan	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan sistem pendukung keputusan dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.			1		
32				Penyusunan kebijakan sistem informasi kerjasama dalam negeri non investasi	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan kolaborasi dan koordinasi berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY;		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY.					
33				Penyusunan kebijakan manajemen pelaporan pemerintahan daerah berbasis elektronik (LPPD)	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan manajemen pelaporan pemerintahan daerah berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Dinas Kominfo DIY; Inspektorat DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY.		1			
34				Penyusunan kebijakan layanan administrasi DPRD berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan administrasi DPRD berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Sekretariat DPRD DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Dinas Kominfo DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.	1				
35				Penyusunan kebijakan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Badan Diklat DIY (PJ); Badan Kepegawaian Daerah DIY; Dinas Kominfo DIY; Dinas Dikpora DIY; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY; BLKPP DIY.		1			
36				Penyusunan kebijakan layanan penelitian dan pengembangan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan penelitian dan pengembangan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Bappeda DIY (PJ); Dewan Riset Daerah DIY; LPPM PTN/PTS DIY; Dinas Kominfo DIY; Inkubator Bisnis dan Teknologi Kab/Kota DIY.			1		
37				Penyusunan kebijakan layanan pengaduan publik berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pengaduan publik berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Inspektorat DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;	1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Dinas Kominfo DIY; Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY; PPID DIY; Media.					
38				Penyusunan kebijakan layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Hukum Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.			1		
39				Penyusunan kebijakan layanan whistle blowing system berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan whistle blowing system berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Inspektorat DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Dinas Kominfo DIY ; Polda/Polres/Polresta DIY; Kejaksaan Tinggi DIY; Kejaksaan Negeri; Kabupaten/Kota; KPK; Media.		1			
40				Pengadaan sistem pengawasan internal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut audit kepegawaian	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah pengadaan sistem pengawasan internal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut audit kepegawaian	Inspektorat DIY (PJ)		1	1	1	
41				Pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen	Biro Hukum Setda DIY (PJ)		1			
42				Penyusunan kebijakan layanan perpajakan dan retribusi daerah berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan perpajakan dan retribusi daerah berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	BPKA DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Inspektorat DIY; Pelaku Usaha Kabupaten/Kota di DIY.	1				
43				Penyusunan kebijakan layanan perizinan terpadu	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan perizinan terpadu berbasis elektronik dengan tingkat	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY (PJ)	1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				berbasis elektronik			kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Dinas Kominfo DIY; Dinas PUP & ESDM DIY; DLHK DIY; Dinas Perizinan Kabupaten/Kota di DIY.					
44				Penyusunan kebijakan layanan informasi publik terpadu berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan informasi publik terpadu berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; PPID DIY; Inspektorat DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.	1				
45				Penyusunan kebijakan layanan pendidikan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pendidikan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Dikpora DIY (PJ); SMA Negeri/Swasta Kabupaten/Kota di DIY; SMP Negeri/Swasta Kabupaten/Kota di DIY; SD Negeri/Swasta Kabupaten/Kota di DIY; Dewan Pendidikan DIY/Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan Kabupaten/Kota di DIY; Media Massa/Elektronik; PTN/PTS.	1				
46				Penyusunan kebijakan layanan kesehatan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan kesehatan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang	Dinas Kesehatan DIY (PJ); RSUD DIY/Kabupaten/Kota		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	di DIY; Puskesmas Kabupaten/Kota di DIY; RS Swasta Kabupaten/Kota di DIY; IDI DIY; BPJS Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.					
47				Penyusunan kebijakan layanan pekerjaan umum dan penataan ruang berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pekerjaan umum dan penataan ruang berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Bappeda DIY; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY; Dinas Kominfo DIY.			1		
48				Penyusunan kebijakan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Bappeda DIY; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY; Dinas Kominfo DIY.				1	
49				Penyusunan kebijakan layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Satpol PP DIY (PJ); Satpol PP Kabupaten/Kota di DIY; Polda/Polres/Polresta di DIY; Dinas Kominfo DIY.			1		
50				Penyusunan kebijakan layanan sosial berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan sosial berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Sosial DIY (PJ); Dinas Kesehatan DIY/Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Dikpora DIY/Kabupaten/Kota di DIY; Biro Adm. Perekonomian dan SDA		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Setda DIY/Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY/Kabupaten/Kota di DIY; Dinas PPPAPP DIY/Kabupaten/Kota di DIY; Bappeda DIY; Dinas Kominfo DIY ; Pekerja Sosial Kabupaten/Kota di DIY; Panti Sosial Kabupaten/Kota di DIY.					
51				Penyusunan kebijakan layanan tenaga kerja berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan tenaga kerja berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY (PJ); Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY; Dinas Koperasi & UKM DIY; Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.		1			
52				Penyusunan kebijakan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas PPPAPP DIY (PJ); Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.			1		
53				Penyusunan kebijakan layanan pangan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pangan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (PJ); Dinas Pangan Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.				1	
54				Penyusunan kebijakan layanan pertanahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pertanahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas PTR DIY/Kabupaten/Kota	1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				elektronik			kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	di DIY; Dinas Kominfo DIY; BPKA DIY cq. Bidang Pengelola BMD; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.					
55				Penyusunan kebijakan layanan lingkungan hidup berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan lingkungan hidup berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan DIY (PJ); Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.		1			
56				Penyusunan kebijakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (PJ); Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.	1				
57				Penyusunan kebijakan layanan perhubungan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan perhubungan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Perhubungan DIY (PJ); Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di DIY; Pengelola Trans Jogja; Dinas Kominfo DIY.		1			
58				Penyusunan kebijakan layanan komunikasi dan informatika	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan komunikasi dan informatika dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di DIY; Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY; Pengelola Jogja Istimewa TV; Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) DIY/Kabupaten/Kota di DIY; Komunitas TIK Kabupaten/Kota di DIY.	1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
59				Penyusunan kebijakan layanan koperasi, usaha kecil, dan menengah berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan koperasi, usaha kecil, dan menengah berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Koperasi & UKM DIY (PJ); Dinas Koperasi UKM Kabupaten/Kota di DIY; Koperasi Kabupaten/Kota di DIY; UKM Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.			1		
60				Penyusunan kebijakan layanan kepemudaan dan olah raga berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan kepemudaan dan olah raga berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Dikpora DIY (PJ); Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di DIY; KONI Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.					1
61				Penyusunan kebijakan layanan kebudayaan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan kebudayaan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kebudayaan DIY (PJ); Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota di DIY; Keraton Jogjakarta; Pakualaman Jogjakarta; Seniman Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.	1				
62				Penyusunan kebijakan layanan perpustakaan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan perpustakaan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah DIY (PJ); Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota di DIY; Perpustakaan PTN/PTS DIY; Perpustakaan Sekolah Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.			1		
63				Penyusunan kebijakan layanan kearsipan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan kearsipan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah DIY (PJ); Dinas Perpustakaan & Arsip Kabupaten/Kota di DIY;			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY.					
64				Penyusunan kebijakan layanan pariwisata berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pariwisata berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kebudayaan DIY/Kabupaten/Kota di DIY; Badan Promosi Daerah DIY/Kabupaten/Kota di DIY; Pengelola Destinasi Wisata; Dinas Kominfo DIY.				1	
65				Penyusunan kebijakan layanan pertanian berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan pertanian berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pertanian DIY (PJ); Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.				1	
66				Penyusunan kebijakan layanan perdagangan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan perdagangan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Disperindag DIY (PJ); Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.	1				
67				Penyusunan kebijakan layanan perindustrian berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan perindustrian berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Adm. Perekonomian dan SDA Setda DIY (PJ); Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota di DIY; Dinas Kominfo DIY.			1		
68				Penyusunan kebijakan layanan publik instansi pemerintah daerah lainnya berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan layanan publik instansi pemerintah daerah lainnya berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Dinas Kominfo DIY (PJ); Perangkat Daerah DIY terkait.					1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
				pemerintahan berbasis elektronik:										
74				Penyusunan tata kelola rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Inspektorat DIY.	1					
75				Penyusunan tata kelola anggaran dan belanja TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola anggaran dan belanja TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); BPKA DIY; Bappeda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Inspektorat DIY.	1					
				Penyusunan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi:										
76				Penyusunan tata kelola pengelolaan data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.	1					
77				Penyusunan tata kelola pengoperasian pusat data terpadu	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengoperasian pusat data terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.	1					

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
78				Penyusunan tata kelola integrasi aplikasi	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola integrasi aplikasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.		1				
79				Penyusunan tata kelola pengelolaan infrastruktur jaringan TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY; Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas Perhubungan DIY.	1					
80				Penyusunan tata kelola pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.			1			
81				Penyusunan tata kelola pengelolaan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY	1					
82				Penyusunan tata kelola integrasi aplikasi	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola integrasi aplikasi dengan tingkat kematangan kapabilitas	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda		1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.					
83				Penyusunan tata kelola pengelolaan aplikasi umum berbagi pakai	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan aplikasi umum berbagi pakai dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.			1		
84				Penyusunan tata kelola pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.		1			
85				Penyusunan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik:									
86				Penyusunan manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.		1			
87				Penyusunan manajemen keamanan data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen manajemen keamanan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY;			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; PPID DIY.					
88				Penyusunan manajemen aset TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen manajemen aset TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); BPKA DIY qq. Bidang Pengelola BMD; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; BPIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.		1			
89				Penyusunan manajemen SDM TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen manajemen SDM TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Badan Kepegawaian Daerah DIY; Badan Diklat DIY; Dinas Dikpora DIY; Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		1			
90				Penyusunan manajemen pengetahuan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen manajemen pengetahuan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Inspektorat DIY.				1	
91				Penyusunan manajemen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen manajemen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY;		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Inspektorat DIY.					
92				Penyusunan manajemen perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen manajemen perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.			1		
93				Penyusunan manajemen data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen manajemen data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; PPID DIY.		1			
				Penyusunan cetak biru sistem pemerintahan berbasis elektronik:									
94				Penyusunan cetak biru aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
95				Penyusunan cetak biru SDM TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru SDM TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Badan Kepegawaian Daerah DIY; Badan Diklat DIY; Dinas Dikpora DIY; Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY.		1			
96				Penyusunan cetak biru infrastruktur jaringan TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Dinas PUP & ESDM DIY.		1			
97				Penyusunan cetak biru data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY		1			
98				Penyusunan cetak biru integrasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru integrasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY;			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
								Inspektorat DIY.						
99				Penyusunan cetak biru integrasi infrastruktur jaringan TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru integrasi infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Badan Kepegawaian Daerah DIY; Dinas PUP & ESDM DIY.			1			
100				Penyusunan cetak biru integrasi data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru integrasi data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Badan Kepegawaian Daerah DIY.			1			
101				Penyusunan cetak biru penganggaran dan pembiayaan TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru penganggaran dan pembiayaan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY.		1				
102				Penyusunan cetak biru pemeliharaan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru pemeliharaan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY		1				
103				Penyusunan cetak biru pemeliharaan infrastruktur jaringan TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru pemeliharaan infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY;		1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	BPKA DIY; Bappeda DIY.					
104				Penyusunan cetak biru struktur organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah dokumen cetak biru struktur organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Badan Kepegawaian Daerah DIY; Inspektorat DIY.		1			
				Penyusunan SOP sistem pemerintahan berbasis elektronik:									
105				Penyusunan SOP pengelolaan data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Inspektorat DIY.		1			
106				Penyusunan SOP pengoperasian pusat data terpadu	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengoperasian pusat data terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.		1			
107				Penyusunan SOP integrasi aplikasi, data, jaringan	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP integrasi aplikasi, data, jaringan dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY;		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.					
108				Penyusunan SOP pengelolaan infrastruktur jaringan TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Dinas PUP & ESDM DIY.		1			
109				Penyusunan SOP pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY.			1		
110				Penyusunan SOP pengelolaan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.		1			
111				Penyusunan SOP pengelolaan aplikasi umum berbagi pakai	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan aplikasi umum berbagi pakai dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY;			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Badan Kepegawaian Daerah DIY.					
112				Penyusunan SOP pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Badan Kepegawaian Daerah DIY; Inspektorat DIY.		1			
113				Penyusunan SOP pengelolaan SDM TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan SDM TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Badan Kepegawaian Daerah DIY; Badan Diklat DIY; Dinas Dikpora DIY; Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY.		1			
114				Penyusunan SOP pemeliharaan sumberdaya TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pemeliharaan sumber daya TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY.		1			
115				Penyusunan SOP pembiayaan sumberdaya TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pembiayaan sumber daya TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi DIY; Biro Hukum DIY; Biro Tata Pemerintahan DIY; Biro PIWPP DIY; BPKA DIY;		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Bappeda DIY.					
116				Penyusunan SOP perencanaan sumberdaya TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP perencanaan sumber daya TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY.		1			
117				Penyusunan SOP investasi TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP investasi TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.		1			
118				Penyusunan SOP pengelolaan aset TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan aset TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY		1			
119				Penyusunan SOP layanan TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP layanan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
120				Penyusunan SOP pengelolaan keamanan informasi	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan keamanan informasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY; PPID DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.			1		
121				Penyusunan SOP pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Adm. Perekonomian dan SDA Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.				1	
122				Penyusunan SOP kepatuhan dan penilaian internal	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP kepatuhan dan penilaian internal dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Badan Kepegawaian Daerah DIY; Inspektorat DIY.					1
123				Penyusunan SOP pemantauan dan evaluasi pengelolaan TIK	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah SOP pemantauan dan evaluasi pengelolaan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Biro PIWPP DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY.					
124				Pengelolaan Aplikasi system informasi analisis dan evaluasi jabatan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah pengelolaan aplikasi sistem informasi analisis dan evaluasi jabatan	Dinas Kominfo (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Inspektorat DIY.		1			
125				Sistem Standarisasi Barang dan Jasa.	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah pengelolaan aplikasi system informasi analisis dan evaluasi jabatan	Biro Organisasi Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo; Inspektorat DIY.		1	1		
126				Pengelolaan aplikasi layanan naskah dinas	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan naskah dinas dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Organisasi Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1		
127				Pengelolaan aplikasi layanan manajemen kepegawaian	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan manajemen kepegawaian dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Badan Kepegawaian Daerah DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK	1				
128				Pengelolaan aplikasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Bappeda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
129				Pengelolaan aplikasi layanan manajemen keuangan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan manajemen keuangan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	BPKA DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1				
130				Pengelolaan aplikasi layanan manajemen aset/barang daerah	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan manajemen aset/barang daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	BPKA DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1				
131				Pengelolaan aplikasi layanan manajemen kinerja	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan manajemen kinerja dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Organisasi Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1			
132				Pengelolaan aplikasi layanan pengadaan	Infrastruktur	APBD DIY Sharing APBD Kabupaten/Kota DIY	Jumlah aplikasi layanan pengadaan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro PIWPP Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; LKPP/LPSE DIY.		1				
133				Pengelolaan aplikasi layanan surat elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan surat elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi	Biro Organisasi Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY;		1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.					
134				Pengelolaan aplikasi sistem pendukung keputusan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah sistem pendukung keputusan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.				1	
135				Pengelolaan sistem informasi kerjasama dalam negeri non investasi	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan kolaborasi dan koordinasi dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1		
136				Pengelolaan aplikasi manajemen pelaporan pemerintahan daerah (LPPD)	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi manajemen pelaporan pemerintahan daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			
137				Pengelolaan aplikasi sistem administrasi DPRD	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi sistem administrasi DPRD dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan	Sekretariat DPRD DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi Setda DIY;			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.					
138				Pengelolaan aplikasi layanan pendidikan dan pelatihan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan pendidikan dan pelatihan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY (PJ); Badan Kepegawaian Daerah DIY; Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.				1	
139				Pengelolaan aplikasi layanan penelitian dan pengembangan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan penelitian dan pengembangan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Bappeda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1		
140				Pengelolaan integrasi aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah integrasi aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK				1	
141				Pengelolaan interoperabilitas aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah interoperabilitas aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY;			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.					
				Pengelolaan aplikasi layanan publik berbasis elektronik;									
142				Pengelolaan aplikasi layanan pengaduan publik	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan pengaduan publik dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Inspektorat DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Vendor TIK.		1			
143				Pengelolaan aplikasi layanan dokumentasi dan informasi hukum	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan dokumentasi dan informasi hukum dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Hukum Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			
144				Pengelolaan aplikasi layanan whistle blowing system	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan whistle blowing sistem dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Inspektorat DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; BPKA DIY; Bappeda DIY; Vendor TIK.			1		
145				Pengelolaan aplikasi layanan perpajakan dan retribusi daerah	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan perpajakan dan retribusi daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/	BPKA DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							transaksi/kolaborasi/optimalisasi						
146				Pengelolaan aplikasi layanan perizinan terpadu.	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan perizinan terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.					1
147				Pengelolaan aplikasi layanan informasi publik terpadu	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan informasi publik terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; PPID DIY; Vendor TIK.		1			
148				Pengelolaan aplikasi layanan pendidikan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan pendidikan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Dikpora DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			
149				Pengelolaan aplikasi layanan pekerjaan umum dan penataan ruang	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ) ; Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.					1
150				Pengelolaan aplikasi layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan tingkat kematangan kapabilitas	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY;					1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
							fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Dinas LHK DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.						
151				Pengelolaan aplikasi layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Badan Satpol PP DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		3	1			
152				Pengelolaan aplikasi layanan sosial	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan sosial dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Sosial DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1				
153				Pengelolaan aplikasi layanan tenaga kerja	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan tenaga kerja dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1			
154				Pengelolaan aplikasi layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas PPPAPP DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.	1	1	1	1	1	
155				Pengelolaan aplikasi layanan pangan dan pertanian	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan pangan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY;	3	1	1	1	1	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.					
156				Pengelolaan aplikasi layanan pertanahan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan pertanahan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas PTR DIY(PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			
157				Pengelolaan aplikasi layanan lingkungan hidup	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan lingkungan hidup dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas LHK DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1		
158				Pengelolaan aplikasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi.	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			
159				Pengelolaan aplikasi layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kesehatan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1		
160				Pengelolaan aplikasi layanan perhubungan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan perhubungan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/	Dinas Perhubungan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY;		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
							transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Inspektorat DIY; Vendor TIK.					
161				Pengelolaan aplikasi layanan komunikasi dan informatika	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan komunikasi dan informatika dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			
162				Pengelolaan aplikasi layanan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Koperasi dan UKM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			
163				Pengelolaan aplikasi layanan penanaman modal	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan penanaman modal dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Perizinan & Penanaman Modal DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			
164				Pengelolaan aplikasi layanan kepemudaan dan olahraga	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan kepemudaan dan olahraga dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Dikpora DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.				1	
165				Pengelolaan aplikasi layanan statistik	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan statistik dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/	Bappeda DIY cq. BPPSD (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
							optimalisasi							
166				Pengelolaan aplikasi layanan kebudayaan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan kebudayaan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kebudayaan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1				
167				Pengelolaan aplikasi layanan perpustakaan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan perpustakaan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1			
168				Pengelolaan aplikasi layanan kearsipan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan kearsipan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1			
169				Pengelolaan aplikasi layanan pariwisata	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan pariwisata dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1				
170				Pengelolaan aplikasi layanan perdagangan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan perdagangan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
171				Pengelolaan aplikasi layanan perindustrian	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi layanan perindustrian dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1		
172				Pengelolaan integrasi aplikasi layanan publik berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah integrasi aplikasi layanan publik berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.		1		1	
173				Pengelolaan interoperabilitas aplikasi layanan publik berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah interoperabilitas aplikasi layanan publik berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK.			1		
				Pengelolaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik:									
174				Pengelolaan data dan informasi elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan data dan informasi elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
175				Pengelolaan pusat data terpadu (DC/DRC)	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah pusat data terpadu (DC dan DRC) yang dikelola	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY;		1		1	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								BPKA DIY; Vendor TIK.					
176				Pengelolaan infrastruktur jaringan TIK (Intranet/Internet: LAN, WAN, FO)	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan infrastruktur jaringan TIK	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.	25	25	25	25	
177				Penyediaan layanan data center Pemerintah DIY (collocation, hosting, dedicated server) bagi Kabupaten/Kota	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase penyediaan layanan data center Pemerintah DIY bagi Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.	20	20	20	20	20
178				Pengelolaan perangkat keras	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan perangkat keras	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.	25	25	25	25	
179				Penambahan kapasitas bandwidth Internet	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah kapasitas bandwidth Internet (MBPS) yang ditambahkan	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		190		230	
180				Pengadaan akses Internet publik gratis di ruang publik	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah titik akses Internet publik gratis di ruang publik yang diadakan	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.	25		50		25
181				Pengelolaan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
				Pengelolaan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik:									
182				Pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY;	25	25	25	25	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Vendor TIK.					
183				Pengelolaan keamanan pusat data terpadu.	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan keamanan pusat data terpadu.	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Vendor TIK.	25	25	25	25	
184				Pengelolaan keamanan infrastruktur jaringan TIK	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan keamanan infrastruktur jaringan TIK	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Vendor TIK.	25	25	25	25	
185				Pengelolaan keamanan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan keamanan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
186				Pengelolaan keamanan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan keamanan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
187				Pengelolaan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan	25	25	25	25	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Setda DIY; Vendor TIK.					
188				Pengelolaan keamanan akses sistem pemerintahan berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan keamanan akses sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
189				Pengelolaan keamanan dokumen elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan keamanan dokumen elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
190				Pengelolaan keamanan ruangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan keamanan ruangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Vendor TIK.	25	25	25	25	
191				Pengelolaan keamanan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pengelolaan keamanan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
				Audit keamanan TIK:									
192				Audit keamanan jaringan	Suprastruktur	APBD DIY	Persentase audit keamanan jaringan	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK; BSSN.	25	25	25	25	
193				Audit keamanan aplikasi	Suprastruktur	APBD DIY	Persentase audit keamanan aplikasi	Dinas Kominfo DIY (PJ);		25	25	25	25

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK; BSSN.					
194				Audit keamanan penyimpanan	Suprastruktur	APBD DIY	Persentase audit keamanan penyimpanan	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK; BSSN.		25	25	25	25
195				Audit keamanan informasi	Suprastruktur	APBD DIY	Persentase audit keamanan informasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK; BSSN.	25	25	25	25	
196				Audit keamanan siber	Suprastruktur	APBD DIY	Persentase audit keamanan siber	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Hukum Setda DIY; Inspektorat DIY; Vendor TIK; BSSN.		25	25	25	25
				Pengelolaan manajemen dokumen elektronik:									
197				Transformasi dokumen elektronik (alih media)	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase transformasi dokumen elektronik (alih media)	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
198				Penandaan digital dan <i>watermarking</i> dokumen elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase penandaan digital dan <i>watermarking</i> dokumen elektronik	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
199				Registrasi <i>e-Record</i>	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase registrasi <i>e-Record</i>	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
200				Pemeliharaan dan pemusnahan dokumen	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemeliharaan dan pemusnahan dokumen	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
201				Penetapan standarisasi metadata dan format akses, pertukaran dan publikasi, dan prosedur	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase penetapan standarisasi metadata dan format akses, pertukaran dan publikasi, dan prosedur	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bappeda DIY;		25	25	25	25

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								BPKA DIY; Vendor TIK.					
				Jogja Province Analytics:									
202				Analisis data makro pembangunan daerah lintas kabupaten/kota	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah laporan analisis data makro pembangunan DIY	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BKAD DIY; Vendor TIK; Pusat Studi PTN/PTS DIY.	1	1	1	1	1
203				Analisis data mikro pembangunan daerah lintas kabupaten/kota	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah laporan analisis data mikro pembangunan DIY	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BKAD DIY; Vendor TIK; Pusat Studi PTN/PTS DIY.	1	1	1	1	1
204				<i>Social media analytics</i>	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah laporan <i>social media analytics</i>	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BKAD DIY; Vendor TIK; Pusat Studi PTN/PTS DIY.	1	1	1	1	1
205				<i>Big data analytics.</i>	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah laporan <i>big data analytics.</i>	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BKAD DIY; Vendor TIK; Pusat Studi PTN/PTS DIY.	1	1	1	1	1
				Pemberlanjutan implementasi Digital Government Service (DGS):									
206				Pemberlanjutan Layanan Digital Pariwisata	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan Layanan Digital Pariwisata	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.	25	25	25	25	
207				Pemberlanjutan Layanan Digital Kebudayaan	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan Layanan Digital Kebudayaan	Dinas Kebudayaan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY;	25	25	25	25	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.					
208				Pemberlanjutan Layanan Digital Pendidikan	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan Layanan Digital Pendidikan	Dinas Dikpora DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.	25	25	25	25	
209				Pemberlanjutan Layanan Digital Perhubungan (Mobilitas)	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan Layanan Digital Perhubungan (Mobilitas)	Dinas Perhubungan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.	25	25	25	25	
210				Pemberlanjutan Layanan Digital Perindustrian, Perdagangan dan UKM Rencana aksi: 1. melakukan kajian 2. penjajakan kemitraan 3. melakukan MoU 4. implementasi kolaborasi	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan Layanan Digital Perindustrian, Perdagangan dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; Dinas Koperasi dan UKM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
211				Pemberlanjutan layanan digital kesehatan	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan layanan digital kesehatan	Dinas Kesehatan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
212				Pemberlanjutan layanan digital kerjasama dan penanaman modal	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan layanan digital kerja sama dan penanaman modal	Dinas Perizinan & Penanaman Modal DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.	15	25	45	15	
213				Pemberlanjutan layanan digital ketenagakerjaan dan transmigrasi	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan layanan digital ketenagakerjaan dan transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY;		25	25	25	25

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Vendor TIK.					
214				Pemberlanjutan layanan digital kehutanan dan perkebunan	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan layanan digital kehutanan dan perkebunan	Dinas LHK DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.		25	25	25	25
215				Pemberlanjutan layanan digital sosial.	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pemberlanjutan layanan digital sosial.	Dinas Sosial DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Vendor TIK.	25	25	25	25	
216				Fasilitasi Penerapan SPM Pariwisata	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SPM Pariwisata	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Pelaku Usaha Pariwisata.	25		25		25
				Fasilitasi Penerapan Standardisasi Jogja Smart Region:									
				Fasilitasi Penerapan Standarisasi Smart Living:									
217				Fasilitasi Penerapan SNI Kuliner	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Kuliner	Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY; Dinas Koperasi dan UKM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Koperasi	25		25		25

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Kabupaten/Kota DIY; UMKM Kabupaten/Kota DIY.					
218				Fasilitasi Penerapan SPM Layanan Jasa Kuliner	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SPM Layanan Jasa Kuliner	Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY; Dinas Koperasi dan UKM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Koperasi Kabupaten/Kota DIY; UMKM Kabupaten/Kota DIY.		25		25	
219				Fasilitasi Penerapan SPM Kesehatan	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SPM Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.	15	15	15	15	15
220				Fasilitasi Penerapan SNI Infrastruktur	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Infrastruktur	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		5		5	
221				Fasilitasi Penerapan SNI Transportasi Ramah Lingkungan	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Transportasi Ramah Lingkungan	Dinas Perhubungan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY;		5		5	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Dinas LHK DIY; Inspektorat DIY.					
222				Fasilitasi Penerapan SPM Layanan Jasa Transportasi Publik Darat	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah Fasilitasi Penerapan SPM Layanan Jasa Transportasi Publik Darat	Dinas Perhubungan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.	4		2		2
223				Fasilitasi Penerapan ISO Indikator Pelayanan dan Kualitas Hidup Kota	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan ISO Indikator Pelayanan dan Kualitas Hidup Kota	Bappeda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
224				Fasilitasi Penerapan ISO Ukuran Infrastruktur Kota Cerdas	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan ISO Ukuran Infrastruktur Kota Cerdas	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
225				Fasilitasi Penerapan ISO Spesifikasi Teknis Prinsip dan Persyaratan Pengukuran Kinerja Infrastruktur Kota Cerdas	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan ISO Spesifikasi Teknis Prinsip dan Persyaratan Pengukuran Kinerja Infrastruktur Kota Cerdas	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda		2		2	1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.					
				<i>Fasilitasi Penerapan Standarisasi Smart Culture:</i>									
226				Fasilitasi Penerapan SNI Kerajinan	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Kerajinan	Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY serta Dinas Koperasi dan UKM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Koperasi Kabupaten/Kota DIY; UMKM Kabupaten/Kota DIY.	1	1	1	1	1
				<i>Fasilitasi Penerapan Standarisasi Smart Society:</i>									
227				Fasilitasi Penerapan SNI e-Commerce	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI e-Commerce	Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY serta Dinas Koperasi dan UKM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Koperasi Kabupaten/Kota DIY; UMKM Kabupaten/Kota DIY.			25		25

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
228				Fasilitasi Penerapan SNI Perdagangan Konvensional	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Perdagangan Konvensional	Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY serta Dinas Koperasi dan UKM DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		25		25	
229				Fasilitasi Penerapan SNI Perdagangan Daring	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Perdagangan Daring	Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY serta Dinas Koperasi dan UKM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY; Koperasi Kabupaten/Kota DIY; UMKM Kabupaten/Kota DIY.			25		25
230				Fasilitasi Penerapan SNI Usaha Jasa	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Usaha Jasa	Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY serta Dinas Koperasi dan UKM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		25		25	
231				Fasilitasi Penerapan SPM Bidang Sosial	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi Penerapan SPM Bidang Sosial	Dinas Sosial DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY;		2		2	1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.					
232				Fasilitasi Penerapan SPM Layanan Pendidikan Formal	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SPM Layanan Pendidikan Formal	Dinas Dikpora DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		25		25	
233				Fasilitasi Penerapan SNI Layanan Pendidikan Nonformal	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Layanan Pendidikan Nonformal	Dinas Dikpora DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY			25		25
234				Fasilitasi Penerapan SNI Kualifikasi Profesi	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Kualifikasi Profesi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.			10		
235				Fasilitasi Penerapan SNI Keamanan dan Keselamatan	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Keamanan dan Keselamatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;		5		5	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.					
236				Fasilitasi Penerapan ISO Sistem Manajemen Pengembangan Berkelanjutan Masyarakat	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan ISO Sistem Manajemen Pengembangan Berkelanjutan Masyarakat	Dinas PPPAPP (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
				<i>Fasilitasi Penerapan Standarisasi Smart Environment:</i>									
237				Fasilitasi Penerapan SNI Pengelolaan Lingkungan	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Pengelolaan Lingkungan	Dinas LHK DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
238				Fasilitasi Penerapan SNI Efisiensi Energi	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Efisiensi Energi	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
239				Fasilitasi Penerapan SNI Energi Terbarukan	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Energi Terbarukan	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;		2		2	1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.					
240				Fasilitasi Penerapan SNI Pengelolaan Air	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Pengelolaan Air	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
				<i>Fasilitasi Penerapan Standarisasi Smart Governance:</i>									
241				Fasilitasi Penerapan SNI Demokratisasi	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Demokratisasi	KPU DIY, Kabupaten/Kota DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
242				Fasilitasi Penerapan SNI Integritas Tata Kelola	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Integritas Tata Kelola	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
243				Fasilitasi Penerapan SPM Transparansi Pelayanan	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SPM Transparansi Pelayanan	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan		2		2	1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.					
244				Fasilitasi Penerapan SNI Informasi Geografis	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Informasi Geografis	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
245				Fasilitasi Penerapan SNI Teknologi Informasi	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah fasilitasi penerapan SNI Teknologi Informasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Inspektorat DIY.		2		2	1
				Penyusunan tata kelola dan manajemen Jogja Smart Province:									
246				Penyusunan tata kelola dan manajemen Jogja Smart Living	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen tata kelola dan manajemen Jogja <i>Smart Living</i>	Dinas Kominfo DIY (PJ); BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.		1			
247				Penyusunan tata kelola dan manajemen Jogja Smart Culture	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen tata kelola dan manajemen Jogja <i>Smart Culture</i>	Dinas Kebudayaan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.	1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
248				Penyusunan tata kelola dan manajemen Jogja Smart Environment	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen tata kelola dan manajemen Jogja <i>Smart Environment</i>	Dinas LHK DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.				1	
249				Penyusunan tata kelola dan manajemen Jogja Smart Governance	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen tata kelola dan manajemen Jogja <i>Smart Governance</i> .	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.	1				
				Penyusunan blueprint Jogja Smart Province:									
250				Penyusunan blueprint Jogja Smart Living	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen <i>blueprint</i> Jogja <i>Smart Living</i>	Bappeda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.			1		
251				Penyusunan blueprint Jogja Smart Culture	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen <i>blueprint</i> Jogja <i>Smart Culture</i>	Dinas Kebudayaan DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.		1			
252				Penyusunan blueprint Jogja Smart Society	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen <i>blueprint</i> Jogja <i>Smart Society</i>	Bappeda DIY (PJ); Dinas Sosial DIY; Dinas Kominfo DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.				1	
253				Penyusunan blueprint Jogja Smart Environment	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen <i>blueprint</i> Jogja <i>Smart Environment</i>	Dinas LHK DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.					1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
254				Penyusunan blueprint Jogja Smart Governance	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen <i>blueprint</i> Jogja <i>Smart Governance</i>	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.		1				
				Evaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen TIK (Pergub DIY 2/2018):										
255				Penyelarasan Rencana Strategis TIK dengan Masterplan Jogja Smart Province	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen Rencana Strategis TIK yang diselaraskan dengan Masterplan Jogja <i>Smart Province</i>	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.	1					
256				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan investasi TIK	Suprastuktur	APBD DIY	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan investasi TIK	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BKAD DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.		50	50			
257				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan aset TIK	Suprastuktur	APBD DIY	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan aset TIK	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.		50	50			
258				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan layanan TIK	Suprastuktur	APBD DIY	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan layanan TIK	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.	50	50				
259				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi	Suprastuktur	APBD DIY	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY;		50	50			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Biro Hukum Setda DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY					
260				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis	Suprastuktur	APBD DIY	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Biro PIWPP Setda DIY; Biro Adm. Perekonomian dan SDA Setda DIY.			50	50	
261				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kepatuhan dan penilaian internal	Suprastuktur	APBD DIY	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kepatuhan dan penilaian internal	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Inspektorat DIY.				50	50
				Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi (Pergub DIY 31/2016):									
262				Evaluasi dan perbaikan pengamanan aset informasi	Suprastuktur	APBD DIY	Persentase evaluasi dan perbaikan pengamanan aset informasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.		50	50		
263				Evaluasi dan perbaikan pengamanan aset pengolahan informasi	Suprastuktur	APBD DIY	Persentase evaluasi dan perbaikan pengamanan aset pengolahan informasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY.			50	50	
264				Evaluasi dan perbaikan	Suprastuktur	APBD DIY	Persentase evaluasi dan perbaikan pengamanan	Dinas Kominfo DIY (PJ);				50	50

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				pengamanan penyimpanan informasi			penyimpanan informasi	Bappeda DIY; BPKA DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Hukum Setda DIY; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.					
				Peningkatan pendapatan asli daerah:									
265				Perbaikan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik	Infrastuktur	APBD DIY	Persentase perbaikan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik	BPKA DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Samsat Kabupaten/Kota DIY.		50	50		
266				Perbaikan sistem penerimaan pajak (Penginapan, Restoran, Gedung, Perdagangan, Jasa) berbasis elektronik	Infrastuktur	APBD DIY	Persentase perbaikan sistem penerimaan pajak berbasis elektronik	BPKA DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY.			50	50	
				Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM TIK:									
267				Pengadaan SDM TIK	Struktur	APBD DIY	Jumlah SDM TIK yang diadakan	Dinas Kominfo DIY (PJ); Badan Kepegawaian Daerah DIY.	6	5	5	5	5
268				Peningkatan kompetensi SDM TIK (pendidikan, pelatihan, sertifikasi)	Struktur	APBD DIY	Jumlah SDM TIK yang dilatih	Dinas Kominfo DIY (PJ); Badan Kepegawaian Daerah DIY; Badan Diklat DIY.	25	25	25	25	25
				Penelitian dan pengembangan TIK:									
269				Penelitian dan pengembangan pengelolaan sumberdaya TIK	Struktur	APBD DIY	Jumlah penelitian dan pengembangan pengelolaan sumberdaya TIK	Bappeda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY.		1			
270				Penelitian dan pengembangan literasi digital	Struktur	APBD DIY	Jumlah penelitian dan pengembangan literasi digital	Bappeda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY.				1	
271				Penelitian dan pengembangan JSP	Struktur	APBD DIY	Jumlah penelitian dan pengembangan JSP	Bappeda DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY.			1		
272	Kapasitas kelembagaan	Perumusan regulasi	Mewujudkan sinergitas	Penyelarasan Kelembagaan Smart	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah kelembagaan dimensi JSP yang diselaraskan	Biro Organisasi Setda DIY (PJ);	1				

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
	urusan Keistimewaan	pelaksanaan urusan Keistimewaan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan desa Internalisasi budaya pemerintahan pada Pemerintah DIY dan kabupaten/kota	kelembagaan Pemerintah DIY, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa Menguatkan nilai keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa	Culture Jogja Smart Province dengan Kelembagaan Keistimewaan				Dinas Kominfo DIY; Tim Pengarah dan Tim Pelaksana JSP.					
	Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan desa	Fasilitasi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan desa Fasilitasi perlindungan, pemanfaatan, dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan desa	Meningkatkan kapasitas badan hukum Kasultanan dan Kadipaten dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan desa Mengembangkan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM pengelola administrasi pertanahan berbasis elektronik:									
273				Pengadaan SDM pengelola administrasi pertanahan Keistimewaan berbasis elektronik (Sistem Informasi Pertanahan, Sistem Informasi Geografis Pertanahan, Sistem Manajemen Basisdata Pertanahan)	Struktur	APBD DIY	Jumlah SDM pengelola administrasi pertanahan Keistimewaan berbasis elektronik yang diadakan	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; BPKA DIY.	2		2		2
274				Peningkatan kapasitas SDM	Struktur	APBD DIY	Jumlah SDM pengelola administrasi pertanahan	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY;		2		2	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				pengelola administrasi pertanahan Keistimewaan berbasis elektronik (Sistem Informasi Pertanahan, Sistem Informasi Geografis Pertanahan, Sistem Manajemen Basisdata Pertanahan)			Keistimewaan berbasis elektronik yang dilatih	Badan Diklat DIY; BPKA DIY.					
275				Penelitian dan pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan Keistimewaan	Struktur	APBD DIY	Jumlah penelitian	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.	1		1		1
276				Penelitian dan pengembangan literasi pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan Keistimewaan digital	Struktur	APBD DIY	Jumlah penelitian	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.	1		1		1
				Penyusunan kebijakan pengelolaan pertanahan Keistimewaan digital:									
277				Penyusunan kebijakan pengelolaan sistem informasi pertanahan Keistimewaan (administrasi, pengelolaan dan pemanfaatan Tanah SG dan PAG)	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan pengelolaan sistem informasi pertanahan Keistimewaan (administrasi, pengelolaan dan pemanfaatan Tanah SG dan PAG)	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.		1	1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
278				Penyusunan kebijakan pengelolaan basisdata pertanahan Keistimewaan terpadu	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan pengelolaan basisdata pertanahan Keistimewaan terpadu	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.			1		
279				Penyusunan kebijakan identifikasi, inventarisasi, pemetaan, sertifikasi, dan rekonstruksi pertanahan Keistimewaan digital	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan identifikasi, inventarisasi, pemetaan, sertifikasi, dan rekonstruksi pertanahan Keistimewaan digital	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.				1	
280				Penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa berbasis elektronik	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa berbasis elektronik	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.					1
281				Penyusunan kebijakan tata ruang tanah Kasultanan	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tata ruang tanah Kasultanan	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.			1		
282				Penyusunan kebijakan tata ruang tanah Kadipaten	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan tata ruang tanah Kadipaten	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.				1	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
				Penyusunan tata kelola dan manajemen pengelolaan pertanahan Keistimewaan berbasis elektronik:										
283				Penyusunan tata kelola dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan tanah SG	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen tata kelola dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan tanah SG	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.		1				
284				Penyusunan tata kelola dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan tanah PAG	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen tata kelola dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan tanah PAG	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.			1			
285				Penyusunan tata kelola dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah dokumen tata kelola dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.				1		
				Penyusunan blueprint pengelolaan pertanahan Keistimewaan berbasis elektronik:										
286				Penyusunan blueprint pengelolaan dan pemanfaatan tanah SG	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah blueprint pengelolaan dan pemanfaatan tanah SG	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman			1			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.					
287				Penyusunan blueprint pengelolaan dan pemanfaatan tanah PAG	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah blueprint pengelolaan dan pemanfaatan tanah PAG	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.				1	
288				Penyusunan blueprint pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah blueprint pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.					1
				Penyusunan SOP pengelolaan pertanahan Keistimewaan berbasis elektronik:									
289				Penyusunan SOP pengelolaan dan pemanfaatan tanah SG	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan dan pemanfaatan tanah SG	Dinas PTR DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.		1			
290				Penyusunan SOP pengelolaan dan pemanfaatan tanah PAG	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan dan pemanfaatan tanah PAG	Dinas PTR DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
291				Penyusunan SOP pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah SOP pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa.	Dinas PTR DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.				1	
292				Penyusunan standar peta digital pertanahan Keistimewaan	Suprastuktur	APBD DIY	Jumlah peta digital pertanahan Keistimewaan yang disusun	Dinas PTR DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.		1			
293				Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Keistimewaan (administrasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dan tanah desa)	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah Sistem Informasi Pertanahan Keistimewaan yang dikembangkan	Dinas PTR DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.		1			
294				Pemutakhiran Basisdata Terpadu Pertanahan (Kasultanan, Kadipaten, Desa, dan tanah hak lainnya)	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah Basisdata Terpadu Pertanahan Keistimewaan yang dimutakhirkan	Dinas PTR DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.	1	1	1	1	
295				Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pertanahan (identifikasi, inventarisasi, pemetaan, dan rekonstruksi hak atas tanah Kasultanan,	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah Sistem Informasi Geografis Pertanahan yang dikembangkan	Dinas PTR DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Bappeda DIY; BPKA DIY; Keraton Yogyakarta; Pakualaman Yogyakarta; Pengelola Keistimewaan DIY.			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				Kadipaten, Desa, dan tanah hak lainnya)									

B. Budaya Cerdas (Smart Culture)

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Pembiayaan	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemahaman tentang Keistimewaan DIY	Menggiatkan proses pembelajaran tentang Keistimewaan DIY	Pendidikan non-formal sistematis tentang Keistimewaan DIY	E-learning Keistimewaan DIY.	infrastruktur	APBD DIY	Jumlah implementasi <i>E-learning</i> keistimewaan	Dinas Kominfo (PJ); Sekda Keistimewaan; Dinas Kebudayaan; Kraton; Kampus; Sekolah.	1				
2		Mencetak kader dan pemimpin yang aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan Keistimewaan DIY	Pengkaderan untuk mencetak para pemimpin di berbagai sektor, yang mengajarkan Keistimewaan DIY	Aplikasi untuk mengelola jejaring kader dan pemimpin Keistimewaan DIY	infrastruktur	APBD DIY	Jumlah implementasi aplikasi pengelolaan jejaring kader dan pemimpin keistimewaan DIY	Dinas Kominfo (PJ); Sekda Keistimewaan; Dinas Kebudayaan; Kraton; Kampus; Sekolah.		1			
3	Manajemen Dalam Penggunaan APBD DIY yang Melibatkan Masyarakat	Meningkatkan pemahaman masalah APBD DIY dan seluk beluknya	Pemberian sosialisasi yang informatif.	Website informatif tentang seluk beluk APBD DIY.	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah realisasi website informatif tentang seluk beluk APBD DIY	Dinas Kominfo (PJ); Dinas Kebudayaan; Komunitas.	1				
4		Meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan yang didukung APBD DIY	Pembimbingan bagi masyarakat sehingga terlibat aktif dan berkontributif	Aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kebudayaan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah realisasi aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk terlibat	Dinas Kominfo dan Dinas Kebudayaan (PJ); Komunitas		1			
5			Penyaluran aspirasi, kontrol, dan evaluasi dari masyarakat	Aplikasi untuk kontrol dan evaluasi kegiatan-kegiatan ber-APBD DIY	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase realisasi aplikasi untuk kontrol dan evaluasi kegiatan-kegiatan ber-APBD DIY	Dinas Kominfo (PJ); Dinas Kebudayaan; Komunitas.		100			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Pembiayaan	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
6	Pemahaman Sejarah, Kebudayaan, dan Kebangsaan Pada Generasi Muda	Membangun generasi muda yang sadar akan sejarah, kuat dalam kearifan lokal, dan visioer dalam semangat kebangsaan	Pendidikan kesejarahan untuk generasi muda. Pendidikan budi pekerti berbasis kearifan lokal untuk generasi muda Pendidikan kebangsaan, kewarganeraan dan Pancasila bagi generasi muda	Aplikasi e-learning pendidikan budi pekerti Aplikasi e-learning pendidikan sejarah dan kebangsaan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah Realisasi Aplikasi e-learning pendidikan budi pekerti dan aplikasi <i>E-learning</i> pendidikan sejarah dan kebangsaan	Dinas Kebudayaan (PJ); Dinas Dikpora; Dinas Kominfo; Kampus; Sekolah; Komunitas; Lembaga Pendidikan.			1		
7		Mencetak generasi muda sebagai pemimpin dan pendidik sejarah, kearifan lokal, dan semangat kebangsaan.	Pembinaan duta-duta muda berbagai bidang (Dimas-Diajeng, Puteri Jogja, Duta Wisata, Duta Museum, Duta Pusaka, dll)	Aplikasi untuk membangun sinergi dan kolaborasi duta-duta muda se-DIY	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah realisasi aplikasi untuk pembangunan sinergi dan kolaborasi duta-duta muda se-DIY	Dinas Kominfo (PJ); Dinas Kebudayaan; Dinas Dikpora; Perguruan tinggi; Sekolah; Komunitas; Lembaga Pendidikan.	1				
8	Potensi Konflik SARA dan Lemahnya Sinergi Antar SARA	Membangun Yogya sebagai masyarakat mini Indonesia	Mengantisipasi terjadinya konflik-konflik SARA	Early Warning System konflik SARA di DIY	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah realisasi aplikasi Early Warning System konflik SARA di DIY	Dinas Kominfo (PJ); Dinas Kebudayaan; Komunitas; Kepolisian.		1			
9		Membangun Yogya sebagai <i>The City of Tolerance</i>	Mangembangkan sistem penanganan/ manajemen konflik-konflik SARA	E-learning pendidikan perdamaian dan pendidikan multikulturalisme	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah realisasi E-learning pendidikan perdamaian dan pendidikan multikulturalisme	Dinas Kominfo (PJ); Dinas Kebudayaan; Komunitas.			1		
10		Memberdayakan para seniman untuk bersama-sama membangun reputasi Yogya sebagai pusat kesenian	Pembinaan per-batik-an dalam rangka mempertahankan predikat Yogya Kota Batik Dunia	Website/aplikasi Yogya Kota Batik Dunia	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah realisasi website/aplikasi Yogya Kota Batik Dunia	Dinas Kebudayaan (PJ); Dinas Kominfo; Komunitas.	1				

C. Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengelolaan kawasan rawan bencana Gunung Merapi (daerah aliran lahar)	Mengembangkan sistem informasi mitigasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem informasi mitigasi bencana berbasis real-time data. Mengembangkan kolaborasi antara wilayah yang terdampak oleh aliran lahar (Kabupaten dan Kota) 	Pengembangan digital database kebencanaan	Infrastruktur	APBD DIY	Presentase peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	BPBD DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bisnis; Komunitas.	25	25	25	25	25
2				Pengembangan sistem informasi kebencanaan	Infrastruktur	APBD DIY	Presentase peningkatan dan pengembangan sistem informasi kebencanaan	BPBD dan Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Kominfo Kab/Kota; Bisnis; Komunitas.	40	30	30		
3				Penyusunan road map mitigasi bencana berbasis teknologi digital.	Suprastruktur	APBD DIY	Presentase progress pengembangan penyusunan <i>roadmap</i> .	BPBD (PJ); Dinas Kominfo.	50	50			
4	Meningkatnya volume air limbah yang dihasilkan oleh masyarakat di DIY	Pengelolaan bersama air limbah dengan memperhatikan hubungan hulu-hilir aliran air limbah	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan bersama informasi volume produksi air limbah kabupaten dan kota beserta titik-titik pembuangan di wilayah DIY Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan 	Pengembangan sistem informasi air limbah kewenangan DIY	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah layanan sistem air limbah terpusat	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Kab/Kota terkait; Komunitas.			1		
5				Penyusunan database volume dan aliran air limbah eksisting beserta proyeksi peningkatan karena penambahan jumlah penduduk dan kegiatan serta	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah layanan sistem air limbah terpusat	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Kab/Kota terkait; Komunitas			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
				kawasan terdampak seluruh DIY										
6				Integrasi unit/kelembagaan yang bertanggungjawab mengelola data dan sistem informasi air limbah	Struktur	APBD DIY	Jumlah layanan sistem air limbah terpusat	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Kab/Kota terkait; Komunitas.			1			
7	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah di Kawasan perkotaan Yogyakarta	Membangun kolaborasi antara Pemkab. Bantul, Pemkab. Sleman dan Pemkot Yogyakarta untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah di KPY	1. Kolaborasi antara Pemkab (Bantul dan Sleman) dan Pemkot Yogyakarta membangun database yang berisikan neraca pemanfaatan sumberdaya air 2. Pengaturan pemanfaatan lahan melalui pengendalian perizinan pembangunan untuk fungsi perumahan dan komersial	Pengembangan database digital sebagai dasar perhitungan neraca sumberdaya air	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah indeks kualitas air	Dinas LHK (PJ); Dinas Kominfo DIY; Komunitas; Akademik.	1					
8				Pengembangan database peruntukan dan kepemilikan lahan untuk pengendalian pemanfaatan lahan yang terintegrasi dengan sistem informasi geografis dan perencanaan yang dikelola oleh Dinas Pertaru.	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah indeks kualitas air	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PJ); Dinas LHK; Dinas Kominfo DIY; Komunitas; Akademik.		1				
9	Semakin meningkatnya volume sampah yang harus dikelola oleh Pemda DIY	1. Meningkatkan pemahaman 3R kepada masyarakat. 2. Membangun sistem pengelolaan	1. Pengembangan infrastruktur TIK untuk mendukung peningkatan pemahaman mengenai 3R dan	Aplikasi untuk pemberian informasi mengenai langkah-langkah 3R dan bank sampah	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi pengelolaan persampahan regional	Dinas LHK (PJ); Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas Kominfo DIY; Komunitas.	1					

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
	sementara lahan yang tersedia terbatas	persampahan dengan menggunakan teknologi terkini	2. Pengembangan infrastruktur TIK untuk pengelolaan sampah di TPS dan TPA											
10				Sistem informasi dan pelaporan volume sampah yang terintegrasi antara yang ada di TPS dan TPA untuk memonitor volume sampah yang harus dikelola	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah aplikasi pengelolaan persampahan regional	Dinas LHK (PJ); Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas Kominfo DIY; Dinas Kab/Kota terkait; Komunitas.		1				
11	Meningkatnya kebutuhan akan penyediaan air baku kepada masyarakat	Kolaborasi antar pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan air baku kepada masyarakat	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas air baku yang diproduksi oleh SPAM Regional 2. Kerja sama antar daerah dalam hal penyediaan air baku terutama di wilayah hulu-hilir.	Pengembangan database jumlah pelanggan (rumah tangga dan komersial) yang terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan (untuk memudahkan update analisis dan perencanaan peningkatan kapasitas layanan)	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Kominfo Kab/Kota; Komunitas.			100			
12				Kolaborasi antar daerah dalam hal kebutuhan dan kemampuan penyediaan air yang difasilitasi melalui database yang dikelola oleh perusahaan daerah air baku (PDAB)	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan SOP kolaborasi.	Dinas PUP & ESDM DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Pemerintah Kab/Kota; Komunitas.		1				
13	Tumpang tindih pengelolaan infrastruktur di kawasan perbatasan	Kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kota di kawasan perbatasan di DIY	1. Pengembangan dan penguatan kapasitas sistem drainase wilayah dan kawasan perkotaan.	Pengembangan sistem informasi pengelolaan drainase wilayah di kawasan perbatasan antar	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah sistem informasi pengelolaan drainase	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas PTR DIY; Dinas Kominfo Kab/Kota;						1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
	antar kabupaten di DIY		2. Penguatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi via kabel untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi	kabupaten dan kota				Komunitas.						
14				Pengembangan platform berbasis big data untuk pemodelan dan peramalan pengelolaan drainase kawasan perkotaan dan kawasan perbatasan	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas Kominfo Kab/Kota; Komunitas.						100
15				Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi kabel yang dikelola oleh sektor swasta dengan mekanisme sharing bandwidth untuk mendukung kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan	Infrastruktur	KPBU (kerjasama pemerintah badan usaha)	Persentase pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi berbagi pakai	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas PTR DIY; Dinas Kominfo Kab/Kota; Komunitas; Bisnis.		25	25	25	25	
16				Peningkatan kapasitas internet perdesaan (bandwidth) untuk mendorong penetrasi teknologi dan informasi sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas.	Infrastruktur	KPBU (kerjasama pemerintah badan usaha).	Persentase pemanfaatan infrastruktur internet pedesaan.	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Kominfo Kab/Kota; Komunitas; Bisnis.		25	25	25	25	
17	Belum optimalnya penataan ruang sebagai	Meningkatkan peran rencana tata ruang dan instrumen	Mendorong pelaksanaan RTRW (rencana tata ruang wilayah) DIY dan	Sistem informasi geografis dan perencanaan berbasis unit	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Kominfo Kab/Kota; Dinas PUP & ESDM			50	50		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
	alat keterpaduan wilayah	turunannya untuk mendorong keterpaduan antar wilayah	kabupaten/kota dan PZ (peraturan zonasi) dalam bentuk perda sebagai alat keterpaduan antar wilayah	administrasi terkecil (desa dan persil) yang terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan dan sistem informasi pertanahan				DIY; Dinas PTR DIY; Komunitas; Bisnis.					
18				Penguatan kapasitas kelembagaan TKPRD dengan memasukkan unsur JSP kedalam elemennya.	Suprastruktur	APBD DIY	Persentase terbentuknya kebijakan kelembagaan TKPRD.	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Kominfo Kab/Kota; Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas PTR DIY; Biro Organisasi Setda DIY.		100			
19	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan peraturan zonasi dan mekanisme insentif-disinsentif 2. Mempercepat implementasi kebijakan LP2B di seluruh kabupaten di DIY	1. Mendorong pembentukan perda pengendalian pemanfaatan ruang (mekanisme insentif-disinsentif) 2. Mendorong pembentukan perda LP2B di seluruh kabupaten di DIY	Sistem informasi geografis berbasis unit administrasi terkecil (desa dan persil) yang terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan dan sistem informasi pertanahan	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	Dinas Kominfo DIY (PJ) Dinas Kominfo Kab/Kota; Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas PTR DIY; Komunitas; Bisnis.				50	50
20				Penguatan kapasitas kelembagaan TKPRD dan sinergi antara DIY dengan kabupaten dan kota.	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah sinergi dan penguatan kelembagaan TKPRD	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Kominfo Kab/Kota; Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas PTR DIY; Biro Organisasi Setda DIY.			1		
21	Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain yang tidak berizin	Pengetatan fungsi pengawasan kawasan hutan dan pengendalian	Penguatan kapasitas kelembagaan di Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan dan	Sistem informasi pemanfaatan dan tutupan lahan yang dikelola bersama-sama antara Bappeda, JSP dan	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah realisasi pengembangan sistem informasi pemanfaatan lahan	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Kominfo Kab/Kota; Dinas LHK DIY; Komunitas.			1		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
		perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan lain	pengendalian kawasan hutan	Dinas Kehutanan										
22				Peta pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan lain yang dapat diakses real time	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah realisasi peta pemanfaatan kawasan hutan	Dinas LHK DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Kominfo Kab/Kota; Biro Organisasi Setda DIY.		1				

D. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
1	Kemacetan dan ketertiban lalu lintas	Pemasyarakatan Transportasi Umum, Non-motor dan Pengaturan Lalu Lintas Terpadu	Pengembangan kebijakan pemantauan dan pengaturan terpadu.	Kebijakan pemantauan dan pengaturan terpadu lalu lintas di DIY	Suprastruktur	APBD DIY	Presentase Keputusan Gubernur pertahun tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan	Dinas Perhubungan (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Akademisi; Bisnis; Kepolisian.	20	20	20	20	20
2			Mengatur pola mobilitas menggunakan ITS (Intelligent Transport System)	Pengembangan ITS dan sistem bike sharing	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Prioritas	Dinas Perhubungan (PJ); Biro Hukum Setda DIY; Akademisi; Bisnis; Kepolisian.		40	60		
3				Membangun infrastruktur <i>big data</i> untuk kehidupan cerdas (<i>smart living</i>)	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Prioritas	Dinas Kominfo (PJ); Dinas Perhubungan; Biro Hukum Setda DIY; Akademisi; Bisnis.			30	70	
4			Pengembangan angkutan umum	Pengembangan berupa: 1. modal transportasi; 2. infrastruktur	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	Dinas Perhubungan (PJ); Dinas Kominfo; Dinas PUP & ESDM; Akademisi;				30	70

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				pendukung transportasi; 3. pembayaran biaya transportasi.				Bisnis.					
5	Mutu Layanan Kesehatan	Integrasi kesediaan dan pendaftaran layanan kesehatan	Pengembangan kebijakan integrasi kesediaan dan pendaftaran layanan kesehatan Pemetaan dan integrasi solusi aplikasi kesehatan yang sudah ada, termasuk posyandu, puskesmas dan rumah sakit Pemetaan status kesehatan dan penyakit di DIY.	Penyusunan peraturan integrasi kesehatan bersama dengan kabupaten dan kota	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah kebijakan	Dinas Kesehatan (PJ); Biro Hukum Setda DIY; RSUD dan RSUP; Dinas Kesehatan Kab/Kota; Akademisi; Bisnis.		1			
6				<i>Pilot project</i> integrasi kesediaan dan pemesanan layanan kesehatan. Terdiri atas rencana aksi: 1. pengembangan integrator SIMRS; 2. pengembangan SPGDT; 3. pengembangan <i>middleware</i> integrasi dengan IDMC.	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan	Dinas Kesehatan DIY (PJ); Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Biro Hukum Setda DIY; RSUD dan RSUP; Dinas Kominfo; Akademisi; Bisnis.			40	30	30
7				Pengembangan peta digital status kesehatan dan penyakit di DIY. Terdiri atas rencana aksi: 1. pengumpulan data sektor kesehatan; 2. pengembangan platform peta	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab Kota.	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK.	Dinas Kesehatan DIY (PJ); Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Biro Hukum Setda DIY; RSUD dan RSUP; Dinas Kominfo DIY; Akademisi; Bisnis.		25	25	25	25

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
				digital; 3. integrasi dengan IDMC										
8	Peningkatan Kunjungan Wisata	Pemanfaatan teknologi digital untuk manajemen pariwisata	Mendorong jejaring antar pelaku wisata Identifikasi daya tarik wisata baru Integrasi informasi event atau kegiatan wisata terkini Layanan pengaduan wisata	Penggunaan media sosial dan <i>big data</i> untuk Identifikasi daya tarik wisata dan pengaduan wisata. Terdiri atas rencana aksi: 1. melakukan analisis kebutuhan data <i>existing</i> ; 2. melakukan analisis dari data media sosial; 3. mengumpulkan sumber data; 4. merancang datamart; 5. menyajikan dalam IDMC.	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Kominfo; Dinas Pariwisata Kab/Kota; Bisnis; Komunitas; Media.	20	20	20	20	20	
9				Integrasi informasi <i>event</i> dan kegiatan Terdiri atas rencana aksi: 1. analisis kebutuhan integrasi event; 2. mengembangkan <i>middleware</i> ; 3. menyajikan dalam Jogja Istimewa <i>Mobile Apps</i> ; 4. menyajikan dalam IDMC.	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Pariwisata Kab/Kota; Dinas Kominfo; Bisnis; Komunitas; Media.	20	20	20	20	20	
10				Mendorong pelaku wisata lokal untuk melakukan jejaring layanan melalui media digital Terdiri atas	Infrastruktur	ABPD DIY	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Kominfo; Bisnis; Komunitas; Media;		25	25	25	25	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				rencana aksi: 1. identifikasi pelaku wisata lokal; 2. pelatihan pengenalan media digital; 3. pelatihan membangun <i>content media digital</i> .				Akademik.					
11				<i>Integrated payment</i> transportasi umum dengan destinasi wisata Terdiri atas rencana aksi: 1. identifikasi sistem transportasi umum (Transjogja); 2. identifikasi destinasi wisata <i>pilot project</i> ; 3. mengembangkan <i>middleware</i> untuk integrasi dengan Jogja Istimewa <i>Mobile Apps</i> ; 4. mengembangkan <i>dashboard integrated payment</i> di IDMC.	Infrastruktur	APBD DIY	Presentase pengembangan integrasi transportasi umum dan destinasi wisata	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Kominfo; Dinas Perhubungan DIY dan Kab/Kota; Bank Indonesia Wilayah DIY; Bisnis; Komunitas; Media.		30	30	40	

E. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*)

E. 1. *Smart Community and Learning*

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
1	Persebaran konten negatif	Pendidikan literasi digital (konten positif) multi-stakeholder	Pengembangan kebijakan dan kelembagaan literasi digital DIY	Pembentukan komite literasi digital DIY	Suprastruktur	APBD DIY	Persentase integrasi antar stakeholder dalam upaya penguatan literasi digital	Dinas Kominfo (PJ); Dinas Dikpora; Akademisi; Komunitas.	30	70			
2				Pembuatan regulasi atau instrumen kebijakan literasi digital di tiap instansi, unit usaha, dan kelompok masyarakat di DIY: Penyusunan <i>masterplan</i> DIY bebas konten negatif	Suprastruktur	APBD DIY	Persentase turunnya konten negatif di media sosial dan pelaporan kasus UU ITE	Dinas Dikpora (PJ); Dinas Kebudayaan; Dinas Kominfo; Biro Hukum Setda DIY; Akademisi; Komunitas.		100			
3				Pengadaan program literasi digital di sekolah	Struktur	APBD DIY	Persentase meningkatnya sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	Dinas Dikpora (PJ); Akademisi; Komunitas; Media.		30	40	30	
4			Pembangunan Infrastruktur untuk memfasilitasi ide kreativitas masyarakat	Pembangunan Yogyakarta Creative Hub.	Infrastruktur	APBD DIY & Dana lainnya	Presentase pembangunan wadah pengembangan kreativitas warga	Dinas Dikpora (PJ); Dinas PUP & ESDM; Dinas Kominfo; Dinas Kebudayaan; Komunitas; Bisnis; Akademisi.			30	70	
5			Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak penguatan literasi digital	Pembuatan aplikasi pencarian komunitas sebagai sarana jejaring masyarakat.	Infrastruktur	APBD DIY	Presentase terciptanya aplikasi jejaring komunitas yang terintegrasi secara daring	Dinas Kominfo (PJ); Bisnis; Akademisi; Komunitas.	30	70			
6			Penguatan literasi digital untuk menciptakan masyarakat digital yang cerdas dan positif	Festival literasi digital: 1. pembinaan pembuatan konten positif di media sosial; 2. sosialisasi literasi digital.	Struktur	APBD DIY	Jumlah acara terkait literasi digital dan jumlah <i>content creator</i> atau <i>influencer</i> di DIY	Dinas Dikpora (PJ); Dinas Kominfo; Akademisi; Komunitas; Media.		100			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
7	Radikalisme dan intoleransi	Diradikalisasi dan budaya hidup dalam kebhinekaan	Penguatan literasi untuk Deradikalisasi dan multikulturalisme.	Pembinaan pembuatan konten media sosial yang mengampanyekan ke-bhinekaan.	Struktur	APBD DIY/APBD DIY	Jumlah turunnya jumlah kasus pelanggaran UU ITE (khususnya terkait isu SARA)	Dinas Dikpora (PJ); Dinas Kominfo; Dinas Kebudayaan; Komunitas; Akademisi.		100				
8	Pendidikan	Fasilitasi pendidikan yang komprehensif, kolaboratif, mandiri, berkelanjutan, dan inklusif dengan bantuan teknologi digital	Pengembangan kebijakan dan kelembagaan <i>smart education</i>	Penyusunan cetak biru pendidikan cerdas di DIY	Suprastruktur	APBD DIY	Persentase sekolah atau sarana pendidikan yang berbasis pada literasi digital dan mengedepankan <i>softskill</i> yang dibutuhkan di era teknologi digital	Dinas Dikpora (PJ); Dinas Kominfo; Dinas Kebudayaan; Akademisi.	25	75				
9			Pembangunan infrastruktur pendukung smart education	Dukungan perangkat fingerprint untuk sekolah	Infrastruktur	APBD DIY/ APBD DIY	Presentase sarana pendidikan yang menggunakan <i>fingerprint</i> untuk sistem presensi	Dinas Dikpora (PJ); Dinas Kominfo; Bisnis; Akademisi.	30	30	40			
10				Pemerataan akses internet jejaring fiber di sekolah-sekolah.	Infrastruktur	APBD DIY & Dana Lainnya	Presentase sarana pendidikan dengan jaringan internet	Dinas Kominfo (PJ); Bisnis; Akademisi.			30	35	35	
11			Pengembangan perangkat lunak pendukung smart education	Pengembangan penggunaan raport elektronik	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah sarana pendidikan yang mengedepankan efisiensi dalam pelaporan hasil belajar siswa	Bisnis dan Dinas Dikpora (PJ); Akademisi.		50	60	54		
12				Pembuatan aplikasi belajar mandiri online	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah platform belajar yang dapat diakses di luar sekolah	Dinas Kominfo, Bisnis, serta Dinas Dikpora (PJ); Akademisi; Komunitas.		1				
13				Membuat market place privat	Infrastruktur	APBD DIY	Presentase pengembangan platform belajar di luar sekolah yang lebih ekonomis dibanding bimbingan belajar privat konvensional	Dinas Dikpora (PJ); Dinas Kominfo; Bisnis; Akademisi; Komunitas.	25	30	45			
14				Membuat market place magang	Infrastruktur	APBD DIY	Presentase tersedianya market place magang berbasis web dan aplikasi mobile untuk siswa atau mahasiswa	Dinas Dikpora (PJ); Bisnis; Dinas Kominfo; Akademisi; Komunitas.		60	40			
15				Membuat platform belajar bahasa daerah	Infrastruktur	APBD DIY	Presentase tersedianya Platform belajar bahasa daerah	Bisnis, Dinas Dikpora, serta Dinas Kebudayaan (PJ); Dinas Kominfo; Akademisi;	15	30	55			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
								Komunitas.					
16		Menciptakan dan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan ahli dalam menyongsong dunia kerja	Penguatan literasi dan kemampuan ketenagakerjaan	Pelatihan kemampuan ringan yang dibutuhkan dunia kerja di era teknologi digital	Struktur	APBD DIY	Presentase jumlah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang berkompentensi tinggi dan siap bersaing dunia kerja	Dinas Dikpora (PJ); Disnakertrans; Akademisi; Komunitas; Bisnis.	10	40	50		
17			Pengembangan infrastuktur pendukung mitigasi bencana	Instalasi perangkat Internet of Things sebagai sensor peringatan dini bencana	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah perangkat Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana	BPBD DIY(PJ); BMKG; Bisnis; Dinas Kominfo; Komunitas.	1	1	1	1	1
18	Kriminalitas	Penekanan angka kriminalitas dan pengawasan aksi kriminal berbasis data dan partisipasi	Pengembangan infrastuktur pendukung pencegahan dan pengentasan aksi kriminal	Pemasangan CCTV di jalur umum dan wilayah yang rawan kriminalitas	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah CCTV yang terpasang	Dinas Perhubungan (PJ); Dinas Kominfo; Kepolisian; Komunitas.	10	20	30	20	30

E. 2. Smart Economy

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
1	Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan berbasis data yang terintegrasi dan komprehensif	Pemanfaatan dan integrasi data yang terkolaborasi antar wilayah	Pengintegrasian data kemiskinan: a. membuat atau menetapkan kelembagaan yang mengelola data terintegrasi.	Suprastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Jumlah lembaga pengelola data yang terintegrasi terbentuk	Dinas Kominfo (PJ); Dinas Kominfo Kab/Kota.	1				
2				b. menyediakan anggaran untuk melakukan integrasi data.	Struktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Persentase ketersediaan anggaran.	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Kominfo Kab/Kota.	30	60	100		
3				c. berkolaborasi dengan seluruh wilayah yang berbeda untuk	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Persentase ketersediaan data kemiskinan yang terintegrasi, terkolaborasi, dan dinamis	Dinas Kominfo DIY(PJ); Biro Tapem Setda DIY; Disdukcapil Kabupaten/Kota DIY;	30	30	40		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
				integrasi data kemiskinan dan menetapkan kriteria berdasarkan data-data yang lebih dinamis berasal dari data kependudukan (keluarga pra sejahtera), data usaha, data perburuhan (tenaga kerja), data pemilik kendaraan bermotor, dan data kependidikan.				Samsat DIY; Disperindag DIY; Dinas Dikpora DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.					
4	Ketimpangan ekonomi antar wilayah	Pemerataan ekonomi berbasis data terintegrasi dan kolaborasi antar wilayah	Analisis kebutuhan perekonomian antar wilayah menggunakan data yang terintegrasi	Analisis potensi dan kebutuhan ekonomi masing-masing wilayah: a. kolaborasi dengan masing-masing wilayah untuk mengintegrasikan data-data potensi dan kebutuhan ekonomi;	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota	Persentase data potensi dan kebutuhan ekonomi yang terintegrasi.	Dinas Kominfo DIY(PJ); Disperindag DIY	30	30	40		
5				b. membangun pusat bisnis di masing-masing wilayah berdasar analisis potensi dan kebutuhan ekonomi sehingga lebih tepat sasaran;	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota	Persentase jumlah pusat bisnis yang tepat sasaran	Disperindag DIY(PJ); Perangkat Daerah Kab/Kota terkait		25	25	25	25
6				c. berkolaborasi dengan penyedia jasa layanan antar dan pasar daring serta	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota; Dana pihak ketiga tidak	Persentase peningkatan pemerataan ekonomi melalui media modern	Disperindag DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait; Komunitas;		25	25	25	25

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
				teknologi finansial pihak ketiga untuk pemerataan ekonomi antar wilayah.		mengikat		Bisnis; Media.						
7	Potensi lokal, UMKM, dan lingkungan bisnis yang belum matang	Pendataan detail potensi lokal termasuk data keuangan yang selalu terbaru	Integrasi data potensi lokal, UMKM, dan keuangan dengan berkolaborasi dengan semua wilayah DIY	Peningkatan potensi lokal dan UMKM DIY menggunakan data yang terintegrasi: a. memvalidasi dan memutakhirkan data UMKM dan potensi lokal berkolaborasi bersama semua wilayah DIY;	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Persentase data potensi lokal dan UMKM DIY yang terintegrasi	Dinas Kominfo DIY(PJ); Dinas Koperasi dan UKM; Disperindag DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.		30	30	40		
8			Kebijakan untuk mengembangkan taksonomi xBRL DIY.	b. Pemerintah menetapkan standar xBRL untuk UMKM;	Struktur	APBD DIY	Jumlah standar xBRL untuk UMKM	Dinas Koperasi dan UKM (PJ); Dinas Kominfo DIY; Disperindag DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.		1				
9			Kebijakan insentif bagi UMKM yang membuat laporan keuangan standar dan mempublikasikan menggunakan xBRL	c. menetapkan anggaran insentif UMKM yang mampu mengelola keuangannya dengan baik;	Struktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Jumlah ketetapan anggaran insentif	Dinas Koperasi dan UKM (PJ);		1				
10				d. berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Program Studi Akuntansi untuk mengembangkan sistem dan pelatihan bagi UMKM agar mampu menghasilkan laporan keuangan standar yang dapat	Suprastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota; Dana pihak ketiga tidak mengikat	Persentase jumlah UMKM yang mampu membuat laporan keuangan sesuai standar	Dinas Koperasi dan UKM (PJ); Dinas Kominfo DIY; Disperindag DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.		25	25	25	25	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
				dipublikasikan menggunakan xBRL										
11		Integrasi data perizinan usaha	Integrasi data perizinan usaha dan kolaborasi antar wilayah untuk syarat perizinan usaha	Berkolaborasi dengan pemerintahan daerah dan OPD terkait untuk: a. mengelola dan mengintegrasikan syarat-syarat perizinan usaha yang unik dari masing-masing wilayah ataupun yang menjadi irisan antar wilayah;	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Persentase terintegrasinya syarat-syarat usaha dari seluruh wilayah DIY	Disperindag DIY (PJ); Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Kominfo DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait; Komunitas; Bisnis; Media.		30	30	40		
12				b. digitalisasi dokumen-dokumen legal persyaratan usaha utama;	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Persentase terdigitalisasinya dokumen-dokumen legal utama persyaratan usaha.	Disperindag DIY dan Dinas Kominfo DIY (PJ).		30	30	40		
13		Pengembangan konsep perizinan usaha modern.	Mengembangkan persyaratan usaha khusus daring maupun konvensional yang menggunakan teknologi daring dan teknologi keuangan (<i>fintech</i>)	Menetapkan persyaratan usaha khusus daring dan konvensional yang menggunakan teknologi daring dan teknologi keuangan (<i>fintech</i>)	Struktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota	Jumlah persyaratan usaha khusus.	Disperindag DIY (PJ).		1				
14	Pengangguran berpendidikan tinggi	Penataan data dan Penumbuhan lapangan pekerjaan berbasis data terintegrasi dan analisis kebutuhan SDM berbasis kolaborasi antar wilayah sesuai dengan nilai-nilai	Integrasi dan perbaikan akurasi data pengangguran berpendidikan tinggi antar wilayah	Berkolaborasi dengan wilayah lain dan pihak ketiga, misalnya perguruan tinggi dan pasar tenaga kerja modern untuk: a. mengintegrasikan dan memperbaiki data pengangguran berpendidikan tinggi yang ada	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Persentase terintegrasinya data pengangguran berpendidikan tinggi DIY	Dinas Kominfo DIY (PJ); Biro Tapem Setda DIY; Disdukcapil Kabupaten/Kota DIY; Perguruan Tinggi; Komunitas; Media; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.		30	30	40		

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
		keistimewaan DIY		di DIY;										
15				b. melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan SDM antar wilayah dengan kategori khusus untuk tenaga berpendidikan tinggi	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota	Persentase selesainya analisis kebutuhan SDM antar wilayah	Biro Tapem Setda DIY(PJ); Disdukcapil Kabupaten/Kota DIY; Dinas Kominfo DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.		40	60			
16			Menumbuhkan keahlian berbasis ekonomi digital dan kreatif berdasarkan nilai-nilai keistimewaan DIY.	Membangun pusat Pelatihan berbasis ekonomi digital dan kreatif serta meningkatkan literasi penanaman nilai-nilai keistimewaan DIY.	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Jumlah Kenaikan partisipan pada pusat pelatihan.	Disperindag DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY.		10	20	30	50	
17			Mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan yang mampu mengisi kekosongan SDM berdasarkan analisis kebutuhan SDM antar wilayah.	Membangun pusat inkubasi bisnis dengan model kantor startup difasilitasi secara gratis hingga satu tahun.	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Jumlah usaha startup yang memanfaatkan pusat inkubasi	Disperindag DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.		50	100	200	400	
18	Industri kreatif yang belum tertata	Pengembangan dan penataan pusat industri kreatif DIY berbasis data yang terintegrasi dan kolaborasi antar wilayah	Pendataan dan pemetaan persebaran industri kreatif di DIY	Membangun suatu pusat kajian dan pengembangan ekonomi kreatif dan digital di DIY untuk integrasi data dan kolaborasi antar wilayah sehingga mampu melakukan analisis dan pemetaan ekonomi digital dan kreatif yang ada di DIY	Infrastruktur	APBD DIY	Jumlah Pusat kajian.	Disperindag DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Koperasi dan UMKM.			1			
19			Memfaatkan potensi tenaga kreatif di DIY	Berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan program studi atau	Suprastruktur	APBD DIY	Jumlah perguruan tinggi yang bekerjasama	Disperindag DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Koperasi dan UMKM; Perguruan tinggi.		3	5	8	10	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap					
									2019	2020	2021	2022	2023	
				menawarkan mata kuliah terkait ekonomi digital dan kreatif										
20			Meningkatkan ekonomi DIY dengan menawarkan keahlian ekonomi kreatif yang bernilai tinggi	Mengundang pemain industri kreatif dari dalam maupun luar negeri untuk membuka kantor dan workshop di DIY	Struktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota; Dana pihak ketiga tidak mengikat.	Jumlah pemain industri kreatif yang membuka kantor di DIY	Disperindag DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Koperasi dan UMKM; Perguruan tinggi.		20	30	50	100	
21	Rantai pasok yang tidak terintegrasi	Monitoring dan memastikan distribusi barang komoditas dan harga-harga terutama sembako lancar	Kebijakan akses data ke produsen, distributor, warung dan toko jejaring termasuk UMKM	Kolaborasi dengan masing-masing wilayah untuk membuat perda dimana pemerintah mendapatkan hak untuk akses data-data transaksi komoditas dari produsen, distributor, UMKM, toko jejaring, maupun warung di wilayah DIY dimana pengumpulan data dapat menggunakan suatu aplikasi atau sistem informasi real time berbasis analisis statistik dan penyampelan	Struktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota.	Jumlah Kebijakan	Dinas Kominfo DIY (PJ); Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.		1				
22				Mengembangkan aplikasi yang dapat dipakai untuk memonitor rantai pasok masyarakat dan merespon atas segala perubahan yang dapat memberi dampak signifikan pada masyarakat	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase terselesaikannya pengembangan aplikasi	Dinas Kominfo DIY (PJ); Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.		30	30	40		
23			Berkolaborasi dengan pihak ketiga yang	Kolaborasi dengan produsen,	Struktur	APBD DIY; APBD	Persentase jumlah pihak yang bekerjasama	Disperindag DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY;		25	25	25	25	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
			terhubung langsung dengan rantai pasok masyarakat secara daring	distributor, UMKM, toko jejaring, toko daring, layanan jasa antar daring, serta warung-warung yang beroperasi di wailayah DIY dan merupakan pelaku transaksi barang-barang komoditas untuk menerapkan aplikasi sistem informasi yang disebutkan di atas		Kab/Kota; Dana pihak ketiga tidak mengikat		Dinas Koperasi dan UKM; Perguruan tinggi.					
24	Dokumen bisnis ilegal	Penggunaan teknologi keamanan dokumen untuk mewujudkan DIY yang ramah dan aman terhadap calon investor	Mengamankan dan mendigitalisasi dokumen legal untuk transaksi bisnis dan perizinan usah	a. melakukan digitalisasi dokumen-dokumen legal yang ada di DIY untuk keperluan izin usaha dan transaksi-transaksi bisnis sehingga mampu mempermudah syarat-syarat izin usaha ataupun transaksi bisnis;	Infrastruktur	APBD DIY; APBD Kab/Kota	Persentase jumlah dokumen legal untuk transaksi bisnis yang terdigitalisasi	Dinas Kominfo DIY(PJ); Disperindag DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait.		30	30	40	
25				b. membangun teknologi <i>blockchain</i> yang dapat dipakai untuk mengamankan data-data dokumen legal sehingga menjamin keamanan saat pelaksanaan transaksi bisnis.	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase selesainya pengembangan teknologi <i>blockchain</i>	Dinas Kominfo DIY (PJ).		30	30	40	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Aspek Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (<i>Pentahelix</i>)	Roadmap				
									2019	2020	2021	2022	2023
26			Fasilitasi kemudahan berbagi dokumen legal/bisnis antara swasta dengan pemerintah, dan swasta dengan swasta	Mengembangkan aplikasi yang dapat dipakai oleh masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen legal yang telah terdigitalisasi tersebut	Infrastruktur	APBD DIY	Persentase selesainya pengembangan aplikasi	Dinas Kominfo DIY (PJ).		30	30	40	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001